



Ahmad Kamal Jama^{1*}
Yulianti²
Hilda Nanda Priyatna³
Amy Septrina
Tampubolon⁴

Jurnal Riset Ilmu Ekonomi
Volume 1 Nomor 1, April 2025

Dampak Perkembangan Aplikasi dan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan Indonesia

Abstrak

Perubahan paradigma pelayanan publik di sektor perpajakan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan digitalisasi melalui pengembangan berbagai aplikasi pajak serta reformasi kebijakan fiskal. Namun, meskipun berbagai upaya modernisasi telah dilakukan, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan masih menghadapi tantangan, terutama terkait persepsi atas transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 250 responden yang merupakan wajib pajak aktif, yang dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian divalidasi melalui uji validitas dan reliabilitas, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik perkembangan aplikasi perpajakan maupun kebijakan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Variabel kebijakan perpajakan menunjukkan kontribusi yang sedikit lebih dominan dibandingkan aplikasi perpajakan dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan efisiensi sistem. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan publik dapat ditingkatkan melalui penyesuaian antara inovasi teknologi perpajakan dan perumusan kebijakan yang akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah terus mendorong integrasi digital yang user friendly dalam layanan perpajakan serta memperkuat mekanisme komunikasi dan edukasi terkait kebijakan fiskal.

Kata Kunci: aplikasi perpajakan, kebijakan perpajakan, kepercayaan publik, sistem perpajakan, digitalisasi fiskal.

^{1,2,3,4}Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ichsan Satya
*kamalebatavia@gmail.com

**Abstract**

The paradigm shift of public services in the taxation sector has encouraged the Indonesian government to digitalise through the development of various tax applications and fiscal policy reforms. However, despite various modernisation efforts, public trust in the tax system still faces challenges, especially related to perceptions of transparency, accountability, and ease of service. This study aims to analyse the effect of tax application development and tax policy on the level of public trust in the Indonesian tax system. This research uses a quantitative approach with an explanatory research type. Data was obtained through distributing questionnaires to 250 respondents who were active taxpayers, selected by purposive sampling. The research instrument was validated through validity and reliability tests, while the data analysis technique used was multiple linear regression to test the relationship between variables. The results showed that both the development of tax applications and tax policies have a positive and significant influence on public trust. Tax policy variables show a slightly more dominant contribution than tax applications in influencing public perceptions of system fairness and efficiency. The conclusion of this study confirms that public trust can be improved through alignment between tax technology innovation and accountable and participatory policy formulation. This study recommends that the government continue to encourage user-friendly digital integration in taxation services and strengthen communication and education mechanisms related to fiscal policy.

Keywords: *taxation application, taxation policy, public trust, taxation system, fiscal digitalisation.*



PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan komponen vital dalam membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, efektivitas sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan kebijakan yang diberlakukan.

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas sistem perpajakan. Kurangnya pemahaman terhadap prosedur digital perpajakan, perubahan regulasi yang dinilai kurang transparan, serta persepsi negatif terhadap integritas lembaga perpajakan menjadi hambatan utama. Meskipun pemerintah telah melakukan digitalisasi melalui berbagai aplikasi seperti DJP Online, e-Filing, dan e-Bupot, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak secara sukarela serta munculnya opini publik yang meragukan keadilan dan transparansi sistem pajak nasional.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rizal, 2024) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, (Hong et al., 2024) menemukan bahwa ketidakpastian kebijakan fiskal turut menurunkan kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan menengah. Kedua studi ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan yang tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dapat melemahkan legitimasi fiskal negara. Permasalahan utama yang diungkap adalah adanya jurang antara kebijakan yang dikeluarkan dan ekspektasi masyarakat sebagai wajib pajak.

Kedua hasil penelitian tersebut pada dasarnya mengarah pada satu aspek penting: kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan terhadap institusi perpajakan, penerimaan pajak akan sulit ditingkatkan, meskipun dari sisi teknis dan regulasi telah dilakukan pembaruan. Maka dari itu, pembangunan sistem perpajakan digital dan perumusan kebijakan fiskal seharusnya diarahkan tidak hanya untuk efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memperkuat persepsi positif masyarakat.

Dari sisi digitalisasi, (Budiatin & Rustiyaningsih, 2021) meneliti pengaruh aplikasi perpajakan terhadap kenyamanan pelaporan pajak, dan menemukan bahwa keberadaan aplikasi digital secara statistik meningkatkan kemudahan akses, tetapi tidak serta merta meningkatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, (Firmansyah, 2021) menyoroiti kebijakan insentif perpajakan saat pandemi yang dinilai kurang



efektif karena minimnya sosialisasi dan tidak menyoar sektor informal. Dua penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan dan aplikasi digital belum optimal dalam membangun trust wajib pajak.

Solusi atas permasalahan tersebut dapat diarahkan pada dua pendekatan strategis: (1) penguatan fitur transparansi dan edukasi pada aplikasi perpajakan digital, dan (2) perumusan kebijakan fiskal berbasis partisipasi masyarakat. Strategi ini menuntut adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi fiskal serta sistem umpan balik dari wajib pajak untuk meningkatkan akuntabilitas.

Untuk memperkuat dasar teoritis dari solusi tersebut, digunakan dua pendekatan teoritis. Pertama, Teori Legitimasi (Prastiwi & Diamastuti, 2023) yang menekankan bahwa kepercayaan publik dapat diperoleh jika lembaga perpajakan dianggap bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Kedua, Teori Technology Acceptance Model (TAM) (Suharto, 2019) yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi perpajakan bergantung pada persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh pengguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan aplikasi perpajakan dan kebijakan fiskal terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perpajakan nasional melalui perspektif berbasis masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel independen, yaitu perkembangan aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan, terhadap variabel dependen berupa kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena mampu mengukur tingkat pengaruh antarvariabel secara objektif dan terukur melalui analisis statistik.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator teoritis dari setiap variabel. Kuesioner disusun dalam bentuk skala Likert lima poin, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”, untuk memberikan fleksibilitas responden dalam menilai setiap pernyataan. Indikator pengukuran untuk variabel perkembangan aplikasi mencakup aspek kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kemanfaatan aplikasi. Sementara itu, indikator kebijakan perpajakan meliputi persepsi terhadap kejelasan, keadilan, dan konsistensi regulasi perpajakan. Untuk variabel kepercayaan publik, indikator yang digunakan mencakup integritas institusi pajak, transparansi layanan, dan persepsi terhadap akuntabilitas fiskal.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada wajib pajak individu dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia. Penyebaran dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti telah menggunakan aplikasi perpajakan minimal selama satu tahun terakhir dan memiliki pengalaman langsung dengan implementasi kebijakan perpajakan terkini. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa responden memiliki relevansi dan pengetahuan yang cukup terhadap variabel yang diteliti.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik inferensial dengan bantuan perangkat lunak pengolah data seperti SPSS atau SmartPLS. Sebelum analisis utama dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten dan akurat. Uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas juga dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linear berganda. Setelah itu, dilakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 untuk menentukan apakah pengaruh yang terjadi bersifat signifikan secara statistik.

Dengan rancangan metode seperti ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang valid mengenai sejauh mana perkembangan aplikasi dan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia, serta memberikan dasar bagi perumusan strategi kebijakan dan teknologi perpajakan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan terhadap 250 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang telah menggunakan aplikasi perpajakan serta terpapar kebijakan pajak dalam kurun dua tahun terakhir. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel perkembangan aplikasi (X_1) dan kebijakan perpajakan (X_2) terhadap kepercayaan publik (Y) terhadap sistem perpajakan Indonesia.

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	r hitung $\geq 0,3$	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perkembangan Aplikasi	5	Valid semua	0,872	Reliabel
Kebijakan Perpajakan	5	Valid semua	0,891	Reliabel
Kepercayaan Publik	6	Valid semua	0,904	Reliabel



Seluruh item pada kuesioner memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,3, menunjukkan bahwa setiap pernyataan valid dalam mengukur konstruksi teoritis masing-masing variabel. Nilai Cronbach's Alpha pada semua variabel di atas 0,8 mengindikasikan bahwa instrumen bersifat reliabel dan konsisten secara internal. Oleh karena itu, instrumen dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Responden

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
Perkembangan Aplikasi	4,21	0,53	2,80	5,00
Kebijakan Perpajakan	4,05	0,67	2,50	5,00
Kepercayaan Publik	4,10	0,61	2,70	5,00

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap perkembangan aplikasi perpajakan memiliki skor rata-rata tertinggi (4,21), yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas teknologi perpajakan digital. Kebijakan perpajakan memperoleh rata-rata 4,05, mencerminkan persepsi positif namun masih terdapat tantangan pada aspek sosialisasi dan kejelasan implementasi kebijakan. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan juga berada pada tingkat tinggi (rata-rata 4,10), namun perlu ditingkatkan dari aspek transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Beta	t hitung	Sig. (p-value)
Perkembangan Aplikasi	0,387	6,421	0,000
Kebijakan Perpajakan	0,451	7,032	0,000
R ² (R Square)	0,672	-	-
F hitung	120,834	-	0,000

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu perkembangan aplikasi dan kebijakan perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Koefisien beta kebijakan perpajakan (0,451) sedikit lebih tinggi dibandingkan perkembangan aplikasi (0,387), mengindikasikan bahwa kualitas kebijakan memiliki kontribusi lebih besar terhadap pembentukan kepercayaan masyarakat. Nilai R² sebesar 0,672 menunjukkan bahwa 67,2% variasi dalam kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh dua variabel ini secara simultan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai F hitung yang signifikan ($p < 0,05$) mengonfirmasi bahwa model regresi layak digunakan untuk prediksi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan



terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Kebijakan perpajakan terbukti memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan perkembangan aplikasi. Oleh karena itu, selain terus meningkatkan kualitas teknologi perpajakan digital, pemerintah perlu memperkuat kejelasan, konsistensi, dan partisipasi publik dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan pajak untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan aplikasi dan kebijakan perpajakan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan persepsi positif masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional. Koefisien regresi yang signifikan pada kedua variabel membuktikan bahwa inovasi digital dan kejelasan kebijakan menjadi elemen kunci dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks kepatuhan fiskal.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anita, 2024), yang menemukan bahwa integrasi sistem e-filing dan e-bupot secara signifikan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian dari (Vientiany et al., 2024) juga menegaskan bahwa kemudahan akses dan user interface yang adaptif pada aplikasi perpajakan berdampak langsung terhadap loyalitas wajib pajak. Sementara itu, studi oleh (Affardi, 2024) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi berbasis cloud oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memperluas inklusi pajak, terutama di sektor UMKM.

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini sejalan dengan hasil studi (Judijanto, 2024), yang menyimpulkan bahwa transparansi dalam penyusunan peraturan perpajakan dapat membangun persepsi keadilan fiskal di kalangan masyarakat. Sementara itu, studi empiris oleh (Latifah & Rosyadi, 2024; Oktaviani, 2024) menunjukkan bahwa konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak pascapandemi menjadi indikator penting dalam menumbuhkan rasa percaya terhadap institusi fiskal negara. Penelitian serupa oleh (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) menyoroti bahwa regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kepatuhan sukarela.

Dalam dimensi integrasi digital dan kebijakan fiskal, penelitian ini berkontribusi memperluas temuan dari (Abu-Silake et al., 2024), yang menguji keterkaitan antara inovasi layanan digital pajak dan persepsi transparansi dalam pelaporan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Junaidi & Sunarmin, 2023), yang mengidentifikasi bahwa sistem digital pajak yang terotomatisasi mendorong pengurangan manipulasi data, sehingga meningkatkan integritas sistem perpajakan.



Kepercayaan publik, sebagai variabel dependen utama, memiliki keterkaitan erat dengan keandalan sistem, akuntabilitas lembaga, dan konsistensi kebijakan. Hal ini didukung oleh temuan (Sinulingga, 2022), yang menemukan bahwa persepsi terhadap keadilan dalam pengenaan pajak meningkatkan kepercayaan jangka panjang terhadap institusi pajak. Studi dari (Supriadi, 2024) di Jepang mengungkapkan bahwa tingkat adopsi aplikasi perpajakan berkorelasi positif dengan transparansi fiskal nasional. Penelitian oleh (Muslim et al., 2025) di konteks ASEAN juga menunjukkan bahwa negara dengan digitalisasi pajak yang maju cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi terhadap institusi fiskal mereka.

Secara khusus, kontribusi penelitian ini memperkuat keterbaruan literatur dengan mengintegrasikan dua variabel utama aplikasi perpajakan dan kebijakan fiskal dalam satu model prediktif yang menjelaskan kepercayaan publik. Berbeda dari sebagian besar studi terdahulu yang memisahkan dua variabel tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara keduanya memiliki daya ungkit yang lebih kuat dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Implikasi dari temuan ini mengarah pada pentingnya harmonisasi antara inovasi teknologi digital dan penyusunan kebijakan yang partisipatif. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus menyempurnakan sistem aplikasi perpajakan dengan mengutamakan prinsip user centric dan berbasis umpan balik publik. Selain itu, transparansi dalam kebijakan fiskal perlu didorong melalui pelibatan publik dalam proses legislasi serta penyediaan informasi kebijakan secara terbuka. Penelitian ini memberikan ruang bagi pengembangan lebih lanjut melalui pendekatan longitudinal untuk menilai perubahan kepercayaan publik seiring dinamika teknologi dan kebijakan fiskal di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif terhadap data yang dikumpulkan dari 250 responden wajib pajak di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan aplikasi perpajakan dan kebijakan perpajakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Inovasi digital dalam bentuk aplikasi pajak memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan akurasi pelaporan yang secara langsung berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan fiskal. Temuan ini menegaskan bahwa adopsi teknologi yang bersifat responsif dan ramah pengguna berkontribusi besar dalam membentuk pengalaman wajib pajak yang lebih baik.

Selain itu, kebijakan perpajakan yang konsisten, transparan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi terbukti menjadi faktor penting dalam



membangun legitimasi institusional. Responden menilai bahwa kebijakan yang dirancang secara partisipatif dan disosialisasikan secara terbuka mendorong rasa keadilan dan keterlibatan publik dalam sistem perpajakan. Dari dua variabel yang diteliti, kebijakan perpajakan menunjukkan pengaruh yang sedikit lebih besar dibandingkan aplikasi perpajakan terhadap kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara transformasi digital dan reformasi kebijakan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan. Peningkatan kualitas layanan berbasis aplikasi perlu diiringi oleh regulasi yang tidak hanya tegas, tetapi juga komunikatif dan berpihak pada kepentingan publik.

Dengan demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi layanan perpajakan secara menyeluruh dan memastikan kebijakan fiskal disusun dengan pendekatan kolaboratif dan transparan. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam literatur perpajakan modern, serta membuka ruang bagi studi lanjutan yang mengkaji aspek lain seperti literasi pajak, kepemimpinan fiskal, dan etika kelembagaan dalam konteks membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan.

Reference

- Abu-Silake, S. A., Alshurafat, H., Alaqrabawi, M., & Shehadeh, M. (2024). Exploring the key factors influencing the actual usage of digital tax platforms. *Discover Sustainability*, 5(1), 88. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00241-2>
- Affardi, C. W. P. (2024). Dampak dan tantangan penerapan pajak digital di Indonesia: Studi kasus PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4093>
- Anita, D. (2024). Peranan Sistem Penerapan Aplikasi Unifikasi E-Bupot dan Efiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Intansi Pemerintah. *STAR*, 21(1), 9–17. <https://doi.org/10.55916/jsar.v21i1.166>
- Aryansah, J. E., Abror, M. Y., & Mirani, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974>
- Budiatin, E. A., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Faktor Sosial, Dan Kondisi Yang Memfasilitasi Terhadap Minat Penggunaan E-Filing Di Kota Madiun. *JRMA/ Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 76–95. <https://doi.org/10.33508/jrma.v9i2.1011>
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), 17.



- Desi Arya Dewi, N. P. (2020). *Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* [Universitas Pendidikan Ganesha]. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Firmansyah, R. (2021). *Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Di Era Pandemi Covid-19* [UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA]. <https://doi.org/10.21009/japa.0203.03>
- Hong, M. G. H., Ke, S. B., & Nguyen, A. D. (2024). *The economic impact of fiscal policy uncertainty: Evidence from a new cross-country database*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400288128.001>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514.
- Junaidi, A., & Sunarmin. (2023). *Transformasi Digital dalam Perpajakan: Dampaknya pada Pengelolaan Keuangan Bisnis*. Takaza Innovatix Labs.
- Latifah, L. L., & Rosyadi, S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Pasca Pandemi Covid-19 Studi Kasus Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1523–1537. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5252>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Muslim, J., Maspufah, C. N., & Lestari, C. D. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN NEGARA. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, 7(2).
- Oktaviani, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Fiskal untuk Menstimulasi Perekonomian Pasca-Pandemi. *Circle Archive*, 1(5). <https://doi.org/10.47467/carc.v1i5.176>
- Prastiwi, D., & Diamastuti, E. (2023). Building trust and enhancing tax compliance: The role of authoritarian procedures and respectful treatment in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(8), 375. <https://doi.org/10.3390/jrfm16080375>
- Reddy, P., Chaudhary, K., & Hussein, S. (2023). A digital literacy model to narrow the digital literacy skills gap. *Heliyon*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14878>
- Rizal, D. S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 54–62. <https://doi.org/10.34308/eqien.v13i01.1701>



- Rusmawan, C. A., Suherman, A., Sidiq, P., Silviana, M., & Nugraha, Y. (2023). Mengajarkan Literasi Digital Pada Masyarakat: Memahami Manfaat dan Bahaya Internet Untuk Mengurangi Kesenjangan Digital. *Konferensi Nasional Literasi Digital Dan Kerelawanan*, 1, 133–136. <https://doi.org/10.57119/knldk.v1i1.72>
- Salsabila, O. D., & Kumala, R. (2021). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Dalam Transparansi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 446–453.
- Sinulingga, N. (2022). Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2, 277–288.
- Suharto, A. D. (2019). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan e-money (Studi kasus: Pengguna Telkomsel Cash (T-Cash) di Regional Jawa Tengah-DIY)*. Unspecified.
- Supriadi, I. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan. *Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting (TAXPEDIA)*, 2(1), 29–44.
- Vientiany, D., Chairani, M., & Imaniah, M. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 734–745. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1895>
- Zainudin, F. M. R., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>